

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menyelenggarakan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik), menurut *United Nation Development Program* (UNDP) terdapat beberapa karakteristik utama yang harus dijalankan salah satunya adalah aspek akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep etika yang harus senantiasa hadir dalam organisasi pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Aspek akuntabilitas ini tentunya juga harus diselenggarakan dalam aktivitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.

Sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tahun 2006 menyatakan bahwa upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Kemudian lebih lanjut dalam PP No.8 tahun 2006 pasal 34 ayat 2 dikatakan bahwa:

Setiap keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.

Saat ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dari laporan keuangan Pemda tersebut masih mengalami banyak permasalahan. BPK RI di Sumut menyampaikan opini WTP kepada Pemprov Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut tahun anggaran 2016. Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas LKPD yang dinyatakan secara profesional oleh pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan, adapun beberapa catatan yang menurut BPK perlu diperbaiki di antaranya penatausahaan rekening bank yang tidak sesuai ketentuan dan terdapat sisa dana BOS pada rekening penampungan yang belum tersalurkan. Kemudian kekurangan kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut. Sedangkan yang terakhir adalah soal serah terima aset tetap dalam rangka pengalihan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) dengan pemerintah kabupaten/kota belum dilaksanakan. Sejumlah hal tersebut adalah temuan BPK terkait sistem pengendalian intern. Sementara terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disampaikan BPK di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pemanfaatan aset di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tidak sesuai ketentuan, dan transfer bagi hasil kepada kabupaten/kota selalu terlambat. (Situs berita <https://economy.okezone.com>, Selasa 30 Mei 2017 20:05 WIB)

Kemudian di tingkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara BPK juga menemukan beberapa permasalahan terkait Laporan Keuangan. Adapun masalah-masalah yang ditemukan antara lain, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tidak tetap tidak diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung, tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca, masalah berikutnya adalah kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, masalah lainnya adalah realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi kenyataannya, serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah. Masalah lain yang menjadi temuan BPK berikutnya ialah terkait keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada BPK. Keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan tersebut menandakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda yang bersangkutan masih terdapat banyak sekali kekurangan (Situs berita <http://www.mdn.biz.id/n/348372/> Jumat, 25 Mei 2018 pukul 07:52 WIB).

Kemudian pada tahun 2019 hasil laporan pemeriksaan BPK mengenai LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditanggapi oleh gubernur Sumatera Utara dengan menyatakan bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara meskipun Sumut meraih opini WTP akan tetapi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjadi agenda prioritas yang harus diperbaiki bersama agar tidak terjadi lagi di masa mendatang (Situs berita

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/5/7/733576/> Selasa, 07 Mei 2019 pukul 15.38 WIB).

Permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih terjadi pada Pemerintah Provinsi Sumut tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Sumut belum dapat dipastikan sudah baik atau buruk. Sehingga penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Utara ini kiranya perlu untuk dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah juga harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP. Dalam prosesnya penyajian laporan keuangan pemerintah juga harus didukung oleh suatu sistem yang dapat bersinergi dalam menghasilkan suatu informasi akuntansi yang selanjutnya disebut dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan yakni rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (PP No.8 Tahun 2006).

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah kemudian menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam menilai dan mengawasi kinerja dari pemerintah. Untuk itu, bentuk transparansi terhadap penyajian laporan keuangan tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian pemerintah sebagai entitas pelaporan dalam hal ini harus menyediakan akses bagi keterbukaan informasi terkait laporan keuangan yang disajikan, sehingga kewajiban penyediaan akses tersebut dapat membuat pemerintah lebih bertanggungjawab dalam menyajikan informasi terkait laporan keuangan yang disajikan.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah ini telah diteliti oleh para peneliti terdahulu dan menyajikan hasil penelitian yang bervariasi diantaranya dalam Setyanto dan Ritchi (2018) menunjukkan bahwa kualitas perangkat lunak sistem informasi akuntansi dan penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan secara parsial positif dan signifikan sedangkan penerapan SAP berpengaruh secara simultan signifikan. Dalam Febrianto dkk (2017) menyatakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan adalah kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Sihaloho (2016) menyatakan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan kualitas sumber

daya manusia dan penerapan teknologi informasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Dalam penelitian Mudjiyono dan Iswahyuni (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sementara aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Fauziah (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan dalam Superdi (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas manajemen keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menyajikan hasil yang beragam terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah tersebut maka penulis ingin mengetahui apakah hal tersebut juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau tidak. Kemudian melihat banyaknya permasalahan yang muncul terkait laporan keuangan pemerintah daerah yang berdampak pada kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemda saat ini, serta melihat kondisi saat ini yang mewajibkan seluruh entitas pemerintahan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam aktivitas pembuatan laporan keuangan, membuat peneliti

menjadi tertarik untuk melihat apakah ada pengaruh dari peraturan penerapan SAP tersebut dalam menghasilkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kualitas *Software* SIA, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Penerapan SAP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sistem pengendalian intern dalam mengotorisasi setiap bukti transaksi masih memiliki kelemahan, hal ini tercermin dari realisasi belanja barang dan jasa yang tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.
2. Sistem informasi akuntansi masih memiliki kelemahan, hal ini tercermin dari aset tidak tetap yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung.
3. Hak publik terhadap aksesibilitas laporan keuangan secara *up to date* masih memiliki hambatan.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual masih mengalami banyak kendala.
5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah masih memiliki banyak kekurangan.

6. Kualitas laporan keuangan Pemda masih memiliki kekurangan, hal ini tercermin dari hasil temuan BPK terkait laporan keuangan Pemda yang masih memiliki banyak permasalahan.
7. Tingkat Kepatuhan dan Ketaatan terhadap peraturan peundangan-undangan masih harus diperbaiki.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini akan membatasi masalah yakni hanya untuk melihat apakah Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kualitas *Software* SIA, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Penerapan SAP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah kualitas *software* SIA berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?

5. Apakah penerapan sistem pengendalian intern, kualitas *software* SIA, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan SAP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kualitas *software* SIA berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah penerapan sistem pengendalian intern, kualitas *software* SIA, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan SAP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kualitas *Software* SIA, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Penerapan SAP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga penulis mengetahui bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat keputusan atau kebijakan baru terkait SPI, ataupun SIA ataupun SAP yang dapat meningkatkan dan memaksimalkan faktor-faktor yang kiranya dapat mendukung terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik lagi. Sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan terkait buruknya pengelolaan keuangan di sektor Pemerintahan.

3. Bagi Akademis dan Praktisi

Sebagai tambahan literatur atau bahan referensi atau sumber informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor Pemerintah.